



Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

SINGKATAN GPK UNTUK GERAKAN PENGACAU KEAMANAN SELAYAKNYA MENGGELITIK UJUNG-UJUNG SYARAF KITA. BETAPA TIDAK. ISTILAH ITU MERUPAKAN SALAH SATU CONTOH PENAMAAN TERHADAP SEKELOMPOK ORANG TANPA

persetujuan dari mereka yang dijadikan obyek penamaan itu. Bahkan tanpa memperdulikan nama yang sudah dimiliki pihak bersangkutan.

Penggunaan istilah seperti GPK adalah aksi sepihak. Sebentuk tindakan memaksakan kehendak sendiri. Sebuah kesewenang-wenangan berbahasa. Yang terluka sebagai korban pertama dan utama dari tindakan itu adalah bahasa, bukan pihak yang ingin diserang dengan memperalat bahasa itu.

Bahasa senantiasa mengandaikan sebuah interaksi timbal-balik. Ada tawar-menawar istilah dan makna. Memberi dan menerima. Hasilnya bisa bermacam-macam kemungkinan. Di satu ujung ekstrem: kegiatan itu bisa berbuah kesepakatan dan saling-pengertian. Karena itu bahasa bisa menjadi lahan yang ideal bagi cinta kasih dan kerjasama. Kemungkinan ekstrem yang lain, komunikasi berbuah perdebatan. Namun sebuah perdebatan yang bagaimana pun singitnya masih

melibatkan kegiatan timbal-balik. Baku-argumentasi selalu mengandaikan keterlibatan dan pertemuan, tanpa jaminan akan berakhir dengan sebuah kesepakatan bulat atau manfaat bagi salah satu atau semua pihak yang terlibat.

Sehari-hari kita berbahasa di antara kedua kemungkinan ekstrem itu. Kemungkinan lain di luar itu adalah terputusnya komunikasi. Interjadi bila pihak yang terlibat kegiatan berbahasa tidak saling menyambung kata dan makna. Tak ada pertemuan. Apalagi memberi-menerima dan tawar-menawar. Entah karena masing-masing terbelah dalam dua dunia yang berbeda, atau karena komunikasi berlangsung sepihak: sebuah monolog yang otoriter.

Bahasa Indonesia mutakhir kaya akan istilah-istilah seperti GPK. Beberapa di antara sesamanya yang sudah kesohor adalah ini: OTB, eks-

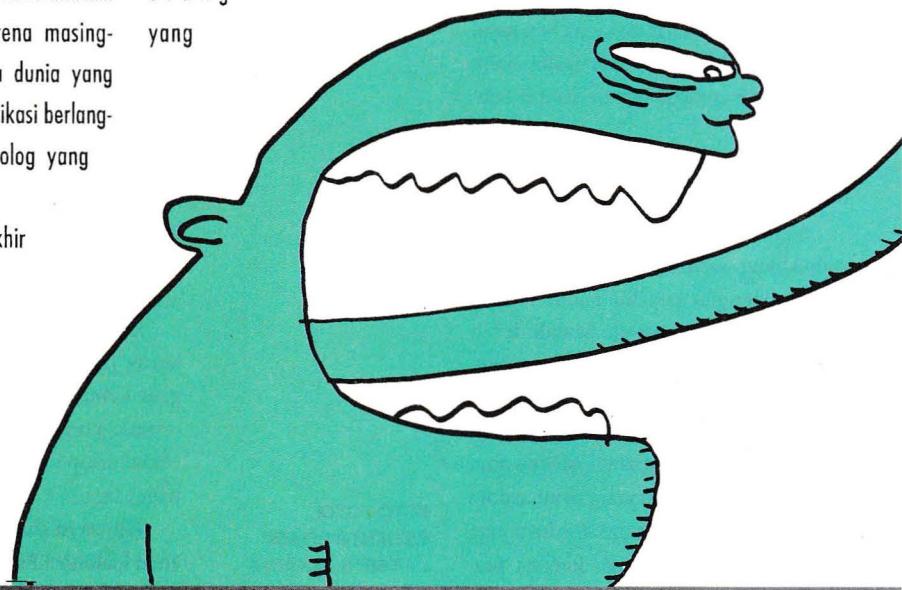
GEPI

trem kiri, ekstrem kanan, G-30-S/PKI, Orde Lama, non-pribumi, TKW, WTS, Nakerwan, kumpul kebo, suku terasing, aliran sesat, preman, aktor intelektual, atau LSM Bermasalah.

Persoalannya bukan apakah penamaan itu menggambarkan kenyataan secara tepat atau menyesatkan. Bukan apakah GPK benar-benar mengacau keamanan (keamanan siapa?). Bukan apa masalah LSM tertentu (siapa yang sebenarnya bermasalah menurut siapa?). Kita bisa mempertanyakan "suku terasing" itu sebenarnya terasing dari siapa? Itu semua memang masalah. Tapi bukan itu yang sekarang ingin saya persoalkan di sini. Sebuah nama tidak harus menggambarkan kenyataan. Nama bisa saja mengungkapkan harapan atau cita-cita yang lebih indah dari kenyataan.

Yang dipersoalkan di sini adalah etika penghormatan bagi nama milik orang lain. Semua istilah yang tersebut di atas menunjuk kepada kelompok manusia yang pernah hidup, bisa berbahasa dan punya hak memiliki nama sendiri. Beberapa di antara mereka bahkan sudah punya nama sendiri. Namun istilah-istilah tersebut dipasang begitu saja oleh pihak lain terhadap mereka, tanpa proses musyawarah dan mufakat yang sering dikhontbahkan birokrat negara. Apakah ini pertanda merajalela sifat dan tindak kesewenang-wenangan dalam masyarakat kita?

Bahasa menunjukkan banca
kata bijak leluhur kita. Obrol
istilah seperti GPK atau OTB
lebih banyak menjelaskan kualitas
peradaban
orang
yang



EKA

ARIEL HERYANTO

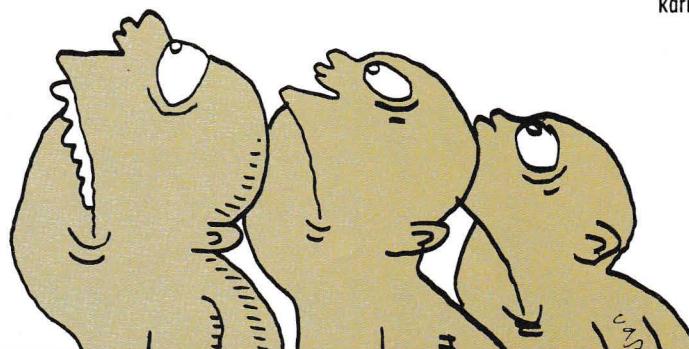
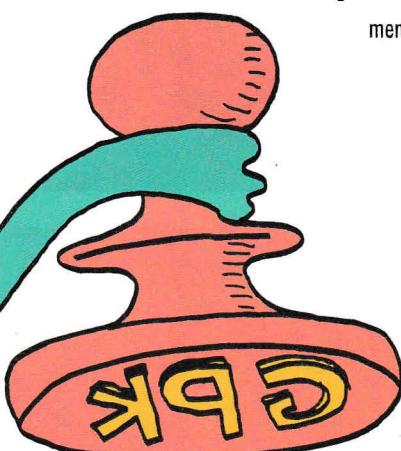
mengucapkan istilah itu ketimbang pihak lain yang maunya dituding oleh istilah itu. Bahasa kita — bukan hanya lalu-lintas, perdagangan, atau lembaga pengadilan kita — terancam menjadilahan berlakunya hukum rimba: siapa kuat dia menang. Ini berlangsung jauh sebelum terjadinya rentetan kekerasan di Jakarta, Situbondo, Tasikmalaya, atau Rengasdenglok.

Sah-sah saja jika para demonstran dan *dissident* yang tahun 1966 mendirikan pemerintah sekarang ini menamakan dirinya Orde Baru atau Angkatan 66. Sama sahnya jika kabinet negara yang sekarang menamakan diri Kabinet Pembangunan. Dan pemerintah yang berkuasa sekarang menamakan sistem pemerintahannya sebagai "Demokrasi Pancasila". Nama-nama yang bagus, apa salahnya? Terlepas dari cocok tidaknya nama-nama itu dengan praktik sehari-harinya.

Sama sahnya jika regim yang mereka tumbangkan menyebut diri sebagai pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Bukan Orde Lama. Mereka tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Mereka tak pernah memberikan persetujuan pada pihak mana pun untuk menyebut mereka sebagai Orde Lama. Bisa dipahami jika

mereka tidak terima dibilang Orla. Sama dengan sebagian dari kelompok budayawan yang menandai tangani Manifes Kebudayaan tidak terima jika disebut "Manikebu" (sperma kerbau) oleh lawan politiknya.

Meng-
riti k



atau menentang politik Demokrasi Terpimpin tidaklah harus dilakukan dengan mengubah-ubah nama yang dikritik atau ditentang. Mungkin ada yang mengajukan sebuah apoloji: hal-hal itu wajar dalam dunia politik. Saling bantai dalam dunia politik bukan saja berlangsung di medan perang, tetapi dalam semua bidang, termasuk kebahasaan. Cara berpikir demikian mengungkapkan bukan saja keperibinatangan, tetapi lebih rendah dari itu. Binatang yang paling buas pun biasanya tidak saling membunuh sesamanya.

Berpolitik tidak harus selalu berarti meletakkan norma dan etika peradaban di tanah untuk diinjak-injak. Tidak selalu harus menghalalkan segala cara seperti yang sering dikutuk oleh pejabat Orde Baru. Di lingkungan politik sekali pun praktik pemberian nama secara sewenang-wenang patut dipertanyakan. Apalagi dalam sejumlah bidang lain yang berlagak lebih beradab, misalnya jurnalisme atau ilmu pengetahuan. Yang mengerikan adalah apabila istilah-istilah julukan seperti tersebut di atas ternyata juga telah dipakai secara santai dalam penulisan jurnalistik atau ilmiah.

Kalau pun pers kita hendak menyebut "GPK" dengan tanda-kutip atau keterangan siapa yang memberi nama itu, selayaknya hal itu dilakukan dengan dua syarat. Pertama, publik diberitahu nama asli yang dipilih "GPK" ini untuk menyebut diri sendiri. Kedua, pembaca juga diberitahu julukan apa (kalau ada) yang sebaliknya diberikan oleh pihak "GPK" terhadap pihak yang selama ini menjuluki mereka "GPK". Ini baru namanya mempraktekkan etika jurnalisme berimbang dan prinsip "cover both sides".

Di negeri ini tidak semua partai politik boleh bebas memilih nama dan gambar lambang untuk partainya sendiri. Entah apakah praktik seperti ini ada di negeri lain. Yang lebih memukau, tampaknya di seluruh sejarah modern, hanya di masyarakat Orde Baru terjadi pergantian massal nama-nama pribadi warganegara dari etnis minoritas. Belakangan, malahan perusahaan, usaha *real-estate*, dan toko tidak boleh sembarangan memilih nama.

Cepat atau lambat praktik semacam ini akan membuktikan hukum karma alias "kualat" dan pepatah "senjata makan tuan". Pada dasarnya, bahasa adalah kegiatan timbal-balik. ■

*Penulis adalah pernah bekerja pada program, Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Setelah ribut-ribut soal pemilihan rektor yang dianggap tidak demokratis, ia memilih keluar. Kini mengajar di Southeast Asian Studies Program mp, National University Of Singapore.